

ANALISIS PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURABAYA

Aloisius Hama
M. Hafidz An Nafik
Anggun Eka Mawardhi
Benekditus Jakson
Sinthiya Magdania

Program Studi Akuntansi STIE YAPAN
SURABAYA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah kota Surabaya. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh pegawai yang bekerja pada instansi tersebut. Uji coba instrumen menggunakan Uji Asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif Sistem Akuntansi Keuangan, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Surabaya, ditunjukkan dengan nilai t hitung = $-0,177$.

PENDAHULUAN

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian pemerintah agar dapat mewujudkan tujuan suatu organisasi. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah (SAP) sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan serta kinerja pemerintah,

agar supaya laporan keuangan dan kinerja pemerintah yang dimaksud dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Sehingga penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak baik akan menyebabkan kualitas laporan keuangan juga tidak baik. Kualitas informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan maka, harus didukung oleh kualitas aparatur pemerintah daerah di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah agar kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan andal dan akurat. Laporan keuangan yang berkualitas tentu diperlukan prosedur pelaporan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan pelaporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan.

Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurnya, umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompensasi dan persyaratan hutang.

Penelitian kali ini berjudul "Analisis Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Surabaya". Dalam hal ini, peneliti menggunakan variabel independen sistem akuntansi keuangan untuk diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Peneliti menggunakan objek penelitian di Badan Perencanaan dan Pembangunan, Kota Surabaya. Melihat pentingnya peranan dalam pengelolaan dan aturan yang dalam penyusunan laporan keuangan daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem

akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standard dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern termasuk pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 238 / PMK 05 / 2011 adalah rangkaian sistematik dari prosedur penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah (Manossoh, 2015).

Pengembangan Hipotesis Sistem Akuntansi Keuangan

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan kandungan sistem akuntansi keuangan daerah yang terdapat dalam Di dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3) sebagai pedoman bagi pemerintah daerah mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai kepada menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah. Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai adalah pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan rangkaian sistematik dari prosedur penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai

dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Hal ini jelas bahwa sistem akuntansi sangat berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.(Manossoh, 2015). Soleha (2014) yang melakukan penelitian dengan Hasil yang ada menunjukkan bahwa implementasi sistem Akuntansi keuangan memberikan pengaruh simultan yang positif dan signifikan yaitu mencapai 55,20% terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil kedua menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan mencapai 20,05% atas akuntabilitas keuangan. Hipotesis yang dapat di ambil berdasarkan riset yang dilakukan peneliti:

H1: Sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Kerangka penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan tujuan umum laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas uatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Kualitas atau mutu dapat dinilai dengan tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu.Sehingga kharakteristik kualitatif harus dipenuhi dalam suatu laporan keuangan agar dapat dinilai sebagai laporan keuangan yang berkualitas. Adapun karakteristik kualitatif dari suatu laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dalam lampiran I yaitu:

a. Relevan

Relevan dalam laporan keuangan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dari mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan berikut ini: memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu, memiliki manfaat prediktif yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, tepat waktu, Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan, Lengkap, Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: penyajian Jujur, Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan, apat Diverifikasi (*verifiability*), Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak

berbeda jauh, netralitas informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud dalam laporan keuangan. Suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Laporan keuangan menyajikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta berbagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan untuk mengevaluasi kinerja organisasi

serta kesesuaian dengan peraturan perundang- undangan yang menjadi pedoman dalam pembuatan laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Sampel didefinisikan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014). Kuncoro (2003) mendefinisikan sampel adalah suatu himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi. Dalam penelitian ini, sampel yang dituju adalah kantor pemerintahan Daerah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Surabaya. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk dalam tipe *nonprobability* dengan metode *judgement sampling*. *Nonprobability* sampling merupakan desain pengambilan sampel dimana elemen dalam populasi tidak mempunyai peluang yang diketahui. Metoda *judgement sampling* yaitu suatu metoda yang melibatkan pilihan-pilihan dari subyek yang memiliki tempat paling menguntungkan atau posisi terbaik yang menyediakan informasi yang dibutuhkan (Sekaran, 2006). Jogiyanto (2004) Mengemukakan bahwa metoda *judgement sampling* adalah metoda yang mempergunakan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria tertentu dalam pemilihan sampelnya. Untuk penentuan jumlah sampel didasarkan pada pendapat Sekaran (2006), yaitu jumlah sampel untuk penelitian korelasional adalah $>$ dari 30 atau $<$ dari 500.

Variabel Penelitian dan Pengukuran Penelitian

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2006). Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

Variabel Dependen.

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan/dipengaruhi variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel kualitas laporan keuangan (Y). Konsep dan definisi

operasional berupa ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Sedangkan beberapa indikator yang dapat digunakan berdasarkan PP 71 tahun 2010 sebagai pedoman pengukuran dalam kuisioner adalah : relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

Variabel Independen

Variable independen adalah variabel yang menjelaskan/ mempengaruhi variabel yang lain. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah Sistem Akuntansi Keuangan (X). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai kepada menyusun dan menyajikan laporan keuangan Daerah diukur dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang diminta menjawab dalam skala likert.

Teknik Analisis

Untuk menganalisis variabel pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan, terhadap kualitas laporan keuangan digunakan metoda statistik dengan tingkat taraf signifikansi $\alpha = 0.05$ yang artinya derajat kesalahannya sebesar 5%. Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis (Ghozali, 2006), yaitu :

Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji F pada dasarnya ditujukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis H_a adalah sebagai berikut :

Jika : *Signifikansi* ($p < \alpha$, $\alpha = 5\%$, maka H_a : ditolak) *Signifikansi* ($p > \alpha$, $\alpha = 5\%$, maka H_a : diterima) Di sini p (probabilitas)=F Jika H_a ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji t (Uji Signifikan Parameter Individual)

Uji t ditujukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis H_0 adalah sebagai berikut :

Jika : Signifikansi ($p < \alpha$, $\alpha = 5\%$, maka H_a : ditolak) Signifikansi ($p > \alpha$, $\alpha = 5\%$, maka H_a : diterima) Di sini $p(\text{probabilitas}) = t$ Jika H_a ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), variabel independen yang diuji berpengaruh terhadap variabel dependen.

PEMBAHASAN

a. Pengujian Parameter Serentak (Uji F)

Adapun analisis uji pada data premier berupa kuisioner yang disebarluaskan. Untuk menghitung hipotesis masalah secara serentak taraf signifikan yang digunakan $\alpha = 0,10$ atau 10% F hitung yang diperoleh dari perhitungan menggunakan aplikasi SPSS sebesar 7,369 sedangkan F tabel menunjukkan angka 4,110 Ketentuan perhitungan uji F adalah apabila F hitung $>$ F tabel atau $P \text{ value} < \alpha$ maka H_0 ditolak sebaliknya apabila F hitung $<$ F tabel atau $P \text{ value} > \alpha$ maka H_0 diterima Pada Perhitungan SPSS menunjukkan bahwa nilai dari F hitung adalah 7,369 karena nilai F hitung lebih dari dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dengan kata lain H_1 diterima. Nilai P value sebesar 0,00, karena nilai P value kurang dari dari α (0,10). Dari keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa parameter dikatakan berpengaruh secara signifikan terhadap model yang artinya sistem akuntansi keuangan daerah (X) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya (Y).

b. Pengujian Parameter Individu (Uji t)

Pengujian parameter individu (Uji t) diperoleh hasil dari aplikasi SPSS sebagai berikut: T hitung prediktor konstan = -0,177, Prediktor X (SAK) = 0,618, sedangkan nilai P value

konstan = 0,861, P value X1 (SAK) = 0,542. Ketentuan hipotesis masalah adalah H_0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai constant terhadap kualitas laporan keuangan (Y) H_1 : terdapat pengaruh. Adapun ketentuan P value H_0 ditolak jika t hitung $>$ t tabel atau P value $< \alpha$ H_0 diterima jika t hitung $<$ t tabel atau P value $> \alpha$. Perhitungan SPSS menunjukkan bahwa nilai dari t hitung adalah -0,177 karena nilai t hitung kurang dari t tabel yang signifikan antara nilai constant terhadap kualitas laporan keuangan (Y). 1,67793 maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Nilai P value sebesar 0,861, karena nilai P value lebih dari α 0,10. Dari keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa parameter dikatakan berpengaruh signifikan terhadap model yang artinya nilai konstanta berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

Uji t Pada Variabel X (SAK) Perhitungan SPSS menunjukkan bahwa nilai dari t hitung adalah 0,618 karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Nilai P value sebesar 0,542, karena nilai P value lebih besar dari α . Dari keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa parameter dikatakan berpengaruh signifikan terhadap model yang artinya SAK (X) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Sistem akuntasi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas keuangan. Hasil tersebut dikarenakan semakin baik sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah maka semakin bagus pula kualitas saji laporan keuangan yang akan dihasilkan. Sistem akuntansi keuangan daerah dalam penelitian ini memiliki nilai negative dari dari t hitung adalah -0,177 artinya semakin baik sistem yang diterapkan maka semakin kecil kemungkinan penyajian laporan keuangan

yang tidak berkualitas karena setiap pemerintah daerah memiliki standar akuntansi pemerintahan yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah serta dalam pemerintahan setiap laporan keuangan akan di periksa oleh auditor baik auditor internal maupun eksternal. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian manusoh (2015) yang memaparkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan Pemberdayaan sistem dan lembaga yang didasarkan pada aturan-aturan dan peraturan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil uji SPSS dan pembahasan mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut: uji t pada variabel X (SAK) Perhitungan SPSS X menunjukkan bahwa nilai dari t hitung adalah 0,618 karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Nilai P value sebesar 0,542, karena nilai P value lebih besar dari α . Dari keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa parameter dikatakan berpengaruh signifikan terhadap model yang artinya SAK (X) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).

DAFTAR PUSTAKA

- Andvig, Jens Chr., Odd-Helge Fjeldstad, Inge Amundsen, Tone Sissener & Tina soreide. 2001. Corruption A Review of Contemporary Research. *Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights Report R* 2001: 7. Web: <http://www.cmi.no>.
- Arikunto, Suharsimi. 2003. Prosedur Penelitian, Suatu Praktek. Jakarta: Bina Aksara.
- Carr, Jared B. & Ralph S. Brower. 2000. Principled opportunism: Evidence from the organizational middle. *Public Administration Quarterly* (Spring): 109-138.
- Colombatto, Enrico. 2001. Discretionary power, rent-seeking and corruption.
- University di Torino & ICER, *working paper*.
- Ghozali, Imam. 2006. *Applikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Semarang : Penerbit UNDIP
- Gujarati, Damodar. 1997. *Ekonometrika Dasar*. Alih Bahasa Sumarno Zain. Erlangga : Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Lupia, Arthur & Mathew McCubbins. 2000. Representation or abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed. *European Journal of Political Research* 37: 291-307.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.Mulyadi (2013:163),
- Fransiska, Neco . Sarwono Aris E. Saptantinah,Dewi Astuti Puji.2016. *Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan KeuanganPemerintah Daerah Di Indonesia*.
- Mokoginta, Novtania . Lambey , Linda . Pontoh , Winston .2017. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*.
- Gilardi, F. 2001. Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation. In ECPR General Conference, Canterbury (UK).
- Strom, K. 2000. Delegation and accountability in parliamentary democracies.

- European Journal of Political Research 37.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
238/PMK.05/2011
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010, tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, Jakarta.
- Sekaran, U. (2006). Metode Penelitian
Untuk Bisnis 1. (4th ed). Jakarta:
Salemba Empat.
- Sukmaningtyas ,Shinta .2017. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian
Pendidikan Pendekatan
Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.
Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, suharsimi. 2010. Prosedur
Penelitian suatu pendekatan
Praktik. Jakarta: Rineka cipta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara.
- Cooper, Donald R., dan Emory, C.
William. 1996. Business
Research Methods. Jakarta:
Erlangga
- Triyani, Zelda .2018. *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan*
- www.kotabatu.go.id